

Kepercayaan Masyarakat dan Transparansi Keuangan Terhadap Implementasi E-Government di Kota Sukabumi

Siti Shalima Najmawati¹, Nita Nurmaya Sopia², Vivi Luthfiani³

^{1,2,3} Universitas Nusa Putra

*siti.shalima_ak22@nusaputra.ac.id, nita.nurmaya_ak22@nusaputra.ac.id,
vivi.luthfiani_ak22@nusaputra.ac.id*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan masyarakat dan transparansi keuangan terhadap implementasi e-government di Kota Sukabumi. Fenomena korupsi yang masih merajalela di Indonesia, termasuk kasus-kasus korupsi yang terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. E-government diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keterbukaan dalam pelayanan publik.

Kata kunci: *Kepercayaan Masyarakat, E-Government, Transparansi Keuangan*

Abstract: This research aims to analyze the influence of public trust and financial transparency on the implementation of e-government in the City of Sukabumi. The phenomenon of rampant corruption in Indonesia, including corruption cases occurring at various levels of government, underscores the importance of transparency and accountability in public financial management. E-government is expected to enhance efficiency, speed, and openness in public services.

Keyword: *Public Trust, E-Government, Financial Transparency*

PENDAHULUAN

korupsi merujuk pada praktek-praktek tidak etis atau ilegal di mana seseorang yang berada dalam posisi kekuasaan atau otoritas memanfaatkan kekuasaan atau jabatannya untuk tujuan pribadi atau keuntungan yang tidak pantas. Praktek korupsi ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti suap, penyuapan, nepotisme, penggelapan, atau manipulasi dalam pengambilan keputusan.

Menurut laporan dari Transparency International (TI), Indonesia masuk dalam jajaran lima besar negara dengan jumlah korupsi yang serius di kelompok ASEAN, Yakni berada pada posisi keempat teratas. Posisi tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pada tahun 2022. Artinya, negara Indonesia ini belum mampu mengatasi permasalahan korupsi yang terjadi hingga saat ini. (Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian

Indonesia, kini terjat dalam pusaran kasus korupsi yang mengguncang Kementerian Pertanian. Kasus ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan gratifikasi dan pemerasan yang melibatkan SYL selama masa jabatannya. Penyelidikan intensif mengungkap berbagai praktik korupsi yang dilakukan untuk keuntungan pribadi dan keluarganya.

Salah satu bukti yang mencolok adalah pembelian jaket mewah senilai Rp 46,3 juta untuk putrinya, Indira Chunda Thita. Jaket tersebut dibeli pada tahun 2023 di Plaza Senayan menggunakan kartu kredit pribadi SYL. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024, Thita mengakui bahwa jaket itu dibeli oleh ayahnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui jika ada pihak lain yang disuruh untuk membayar jaket tersebut.

SYL memberikan kesaksian bahwa ia memang memberikan kartu kreditnya kepada seseorang bernama Panji untuk membeli jaket tersebut. "Pembelian jaket itu saya kasih ke credit card saya sama Panji," ujarinya di hadapan majelis hakim. Meski demikian, SYL membantah bahwa gratifikasi dan pemerasan dilakukan secara sistematis untuk keuntungan pribadi.

Namun, jaket mewah tersebut hanya puncak dari gunung es. KPK menemukan bahwa SYL diduga menerima berbagai bentuk gratifikasi berupa uang dan barang mewah dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Tak hanya itu, ia juga diduga memeras sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk mendapatkan

setoran dari proyek-proyek yang dijalankan di kementerian tersebut.

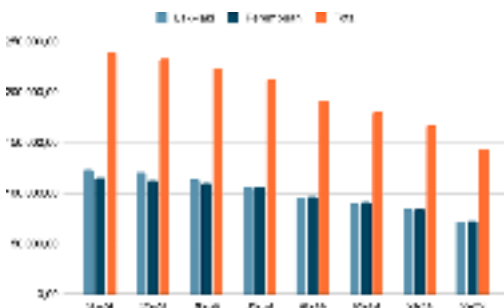
Kasus ini turut menyeret dua pejabat lain di Kementerian Pertanian, yakni Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagyo dan Direktur Kementan nonaktif Hatta. Keduanya diduga berperan aktif dalam membantu SYL menerima dan mengelola gratifikasi serta melakukan pemerasan. Penangkapan beberapa pejabat Kementerian Pertanian melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK menjadi titik awal penyelidikan ini. Bukti-bukti berupa dokumen keuangan, barang mewah, dan transaksi uang berhasil diamankan oleh KPK, memperkuat dugaan keterlibatan SYL dalam tindak pidana korupsi ini.

Sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta terus mengungkap berbagai fakta mengejutkan mengenai aliran dana dan gratifikasi yang diterima oleh SYL. Dalam persidangan, Ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh memastikan bahwa Thita mengetahui harga jaket tersebut dan bahwa ia mengetahui jaket itu dibeli oleh ayahnya.

Proses hukum masih berjalan, dan ancaman hukuman berat membayangi SYL serta pejabat-pejabat terkait jika terbukti bersalah. KPK berkomitmen untuk terus menyelidiki dan mengungkap seluruh jaringan korupsi di Kementerian Pertanian, membawa mereka yang bertanggung jawab ke hadapan hukum. Kasus ini menjadi cermin betapa dalamnya praktik korupsi yang masih menghantui birokrasi di Indonesia, dan menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Selain itu, ada lagi kasus korupsi yang melibatkan proyek Pasar Pelita di Kota Sukabumi telah menjadi perhatian publik sejak Polres Sukabumi Kota menyerahkan berkas perkara pada Oktober 2022. Kasus ini menyeret dua tokoh penting: mantan Direktur PT AKA, Irwan, dan mantan Staf Ahli Wali Kota Sukabumi, Ayep Supriatna. Keduanya telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim, dengan Irwan divonis 13 tahun penjara dan denda Rp 400 juta, sementara Ayep divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Korupsi merupakan kanker yang merusak bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara serta mengancam kesejahteraan masyarakatnya. Praktik korupsi tidak hanya menghambat investasi dan mengganggu alokasi sumber daya ekonomi yang efisien, tetapi juga menyebabkan penurunan kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial seringkali disalahgunakan oleh para pejabat yang korup, merugikan negara secara signifikan. Selain itu, korupsi juga memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan keuntungan kepada orang-orang yang memiliki akses ke kekuasaan dan kekayaan, sementara masyarakat yang kurang beruntung terus menderita akibat dampak buruknya.



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2020-2035, diolah/ BPS-Statistics Indonesia, Regency/ Municipality Population Projections in Jawa Barat Province 2020-2035,

Grafik diatas menunjukkan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukabumi, 2023 Population by Sex and by Age Groups in Sukabumi Regency, 2023. Pada usia tersebut, beberapa masyarakat pasti nya sudah pernah menggunakan dan mengimplementasikan langsung e-government kota sukabumi.

Di Indonesia, implementasi pemerintahan elektronik atau e-government telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Salah satu kota di Indonesia yang telah aktif menerapkan konsep e-government adalah Kota Sukabumi. E-government di Kota Sukabumi telah memberikan harapan untuk memperbaiki aksesibilitas, kecepatan, dan keterbukaan dalam pelayanan publik.

Namun, adopsi e-government dapat memberikan banyak manfaat, terdapat juga tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan kepercayaan publik dan transparansi keuangan. Kepercayaan publik merupakan pondasi utama dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan dan mendapatkan dukungan untuk program-programnya.

Transparansi keuangan juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.

Masyarakat perlu diberi akses yang jelas dan mudah untuk memantau pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks e-government, transparansi keuangan menjadi lebih penting karena pengelolaan keuangan yang terbuka dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik-praktik korupsi.

Oleh karena itu, penelitian mengenai kepercayaan publik dan transparansi keuangan dalam implementasi e-government di Sukabumi City menjadi sangat relevan. Dengan memahami tingkat kepercayaan masyarakat dan transparansi keuangan yang ada, pemerintah Kota Sukabumi dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas e-government serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana e-government dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan transparansi keuangan di Sukabumi City, serta rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan yang diperlukan untuk mendorong adopsi yang lebih luas dan efektif dari inisiatif e-government tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

E-Government

Menurut Hardiansyah (2011), E-government adalah kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam

rangka mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif.

Menurut Fuadi dan Wardiyanto (2010), E-Government adalah sebuah garis depan dari rencana pemerintah untuk mendukung serta menyediakan informasi dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit-unit pemerintah lain dan organisasi sektor ketiga.

Kepercayaan masyarakat

Kepercayaan yang didefinisikan sebagai penilaian kolektif terhadap E-Government adalah penyediaan layanan publik oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya bahwa kelompok tersebut akan dilayani oleh pemerintah secara online. E-Government adalah bertindak jujur, mampu memenuhi komitmennya dan penggunaan teknologi informasi agar tidak merugikan kelompok lain. Definisi ini layanan elektronik untuk warga negara, bisnis dan lainnya menegaskan bahwa mitra tidak akan bertentangan dengan lembaga pemerintah. Dengan adanya e-expectations dari mitranya (Park dan Blenkinsopp, pemerintah, diharapkan mampu memperbaiki tahun 2011). Kepercayaan terhadap lembaga publik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan melalui standar, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga. Prinsip yang mendasari penyediaan layanan dan informasi e-Government. Publik adalah kerangka kelembagaan yang praktis sehingga lembaga dapat meningkatkan kepercayaan mereka, meningkatkan kinerja internal lembaga publik dengan mengadopsi teknologi baru seperti sektor dengan

mengurangi biaya dan waktu transaksi. Situs web e-pemerintah. Dengan adanya website ini, diharapkan pemerintah dapat lebih mengintegrasikan alur kerja dan proses penyampaian informasi serta pelayanan publik sehingga dapat menggunakan sumber daya secara efektif. akan lebih transparan dan mengurangi penyalahgunaan E-Government dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Kepercayaan terhadap pemerintah atau pelayanan atas keterbukaan informasi sehingga masyarakat mempunyai hak 138 tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah (PBB, 2019).

Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan dalam bidang pemerintahan sebagian besar berkaitan dengan penyediaan informasi yang terbuka, artinya setiap warga negara dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan yang dibutuhkannya, dapat memantau kinerja pemerintah dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Tingkat keterbukaan informasi secara ekonomi ditentukan oleh kuantitas dan kualitas informasi antara pemerintah dan warga masyarakat, meningkatkan sistem penyebaran informasi. Dengan jelasnya diharapkan pertukaran informasi obesitas dapat menghilangkan hambatan-hambatan asimetri informasi, sehingga tidak ada lagi informasi-informasi luas yang tersembunyi. Menurut Grimmelikhuijsen dan Welch (2012), transparansi pemerintah berarti masyarakat dapat mengetahui proses dan kegiatan apa yang dilakukan pemerintah. Terdapat tiga komponen terkait kejelasan

informasi keuangan, yaitu transparansi dalam proses pengambilan keputusan

terkait anggaran, transparansi kebijakan yang terkandung dalam penggunaan anggaran, dan transparansi hasil penggunaan anggaran berdasarkan sistem. Transparansi dalam pengambilan keputusan menggambarkan sebuah Refresh langkah demi langkah bagaimana suatu keputusan diambil, mengapa keputusan itu diambil, dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap keputusan tersebut. Transparansi kebijakan mengacu pada bagaimana implementasi suatu kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan warga negara. Transparansi hasil kebijakan terutama berkaitan dengan dampak penerapan prosedur yang diterapkan.

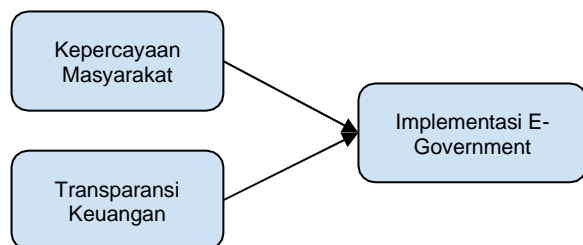
Transparansi Keuangan dalam E-Government dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Transparansi di bidang pemerintahan pada dasarnya berkaitan dengan penyediaan informasi yang terbuka, artinya setiap warga negara dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkannya, dapat memantau kinerja pemerintah dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Tolbert dan Mossberger (2006) menunjukkan bahwa e-Government dapat meningkatkan kepercayaan berbasis proses dengan meningkatkan interaksi pemerintah dengan warga negara, sedangkan warga negara dapat melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Mereka menggunakan Pew Internet dan American Life Project sebagai sampel dari 815 orang yang menggunakan situs web pemerintah. Negara - negara dengan tingkat korupsi yang rendah menunjukkan korelasi yang tinggi antara

tingkat e-Government dan tingkat kepercayaan pemerintah.

Penelitian Moon (2003) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terus melemah akibat pemborosan, ketidakefektifan, dan kurangnya pemahaman kebijakan. Moon (2003) berpendapat bahwa untuk membantu memulihkan kepercayaan publik adalah transparansi informasi sehingga warga negara dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan mengawasi pemerintah. Dengan adanya kejelasan informasi, diharapkan efisiensi biaya tercapai dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang diambil. Dari uraian diatas disimpulkan bahwa E-Government memberikan solusi untuk meningkatkan kepercayaan melalui transparansi informasi. Transparansi informasi dapat meningkatkan komunikasi antara warga negara dan pemerintah sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pemantauan kegiatan pemerintah.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk mengukur dan menganalisis data

numerik secara sistematis, sementara metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci keadaan sebenarnya dari objek penelitian. Metode kuantitatif melibatkan penggunaan banyak angka mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren dalam data yang diperoleh.

Pendekatan Penelitian Ini menentukan Bagaimana kuatnya pengaruh dari keuangan transparansi di tingkat kepercayaan publik. Data diperoleh dengan cara mendistribusikan kuesioner. Penyebaran kuesioner secara online dilakukan pada bulan juni 2024. Untuk mengetahui jumlah kelayakan sampel penelitian menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

N = Jumlah populasi

n = Jumlah sampel

d = presiasi yang digunakan 10% atau 0,1

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

$$n = \frac{238.940}{238.940(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{238.940}{238.940 (0,01) + 1}$$

$$n = \frac{238.940}{2.390,4}$$

$$n = 99,9$$

Berdasarkan keterangan diatas, sampel yang akan diambil oleh peneliti berjumlah 100 masyarakat. Data yang akan dipakai dalam penelitian ini ditinjau dari sumber datanya yaitu dari

data primer. Data primer diperoleh dari para responden masyarakat yang berusia 20 tahun keatas. Dalam penelitian ini, jenis ukuran data yang digunakan adalah ordinal. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik berupa uji validitas dan uji reliabilitas.

Instrumen Penelitian menggunakan daftar pertanyaan tentang kepercayaan masyarakat dan transparansi keuangan terhadap implementasi e-governmentt di Kota Sukabumi. Setiap pertanyaan diberi skor 1 sampai dengan 5.

Kriteria Skor :

Skor 1 = Jika responden sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Skor 2 = Jika responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Skor 3 = jika responden netral dengan pernyataannya.

Skor 4 = jika responden setuju dengan pernyataan tersebut.

Skor 5 = jika responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

-

KESIMPULAN

-

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Public trust and financial transparency of e-government implementation in bandung city. journal of economics business and government challenges 2019;2(2):136-143.
<https://doi.org/10.33005/ebgc.v2i2.81>
- [2] Transparency, Audit Results of Financial Reports and Corruption in Provincial Governments in Indonesia
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/89973>
- [3] EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PENGADUAN DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO) KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
<http://eprints.ipdn.ac.id/6714/1/RINGKASAN%20SKRIPSI%20ALPIANSYAH%20G1.pdf>
- [4] SYL Ngaku Belikan Jaket Rp 46 Juta untuk Anak Pakai Kartu Kredit
<https://news.detik.com/berita/d-7376505/syl-ngaku-belikan-jaket-rp-46-juta-untuk-anak-pakai-kartu-kredit-pribadi>
- [5] Jadi Tersangka Korupsi Pasar Pelita, Staf Ahli Wali Kota Sukabumi Diberhentikan
<https://daerah.sindonews.com/read/906557/701/jadi-tersangka-korupsi-pasar-pelita-staf-ahli-wali-kota-sukabumi-diberhentikan-1665144636>
- [6] Badan Pusat Statistik Sukabumi
<https://sukabumikab.bps.go.id/statictable/2024/06/03/702/jumlah-penduduk-berdasarkan-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-sukabumi-2023.html>